

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait penelitian tentang Manajemen Kurikulum Inklusi, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya ialah :

1. Penelitian dengan judul “*Model Pendidikan Inklusi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sewon Bantul*”. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Fitriana, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah model pendidikan inklusi yang digunakan di SMP N 2 Sewon Bantul pada mata pelajaran PAI. Proses pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas regular, peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama siswa-siswi normal sepanjang hari di kelas regular, namun dalam suatu waktu, para siswa ABK itu diarahkan dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan pembimbing khusus, hal tersebut dimaksudkan menyamaratakan kemampuan mereka dengan siswa lainnya, walaupun terkadang di kelas yang terdapat siswa ABK membutuhkan beberapa pertemuan untuk satu kompetensi dasar (Ayu Fitria, 2012).

2. Penelitian yang berjudul “*Manajemen Pembelajaran Siswa Tunanetra (Studi Kasus di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta)*”. Penelitian ini adalah skripsi yang disusun oleh Johandri, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan atau realisasi manajemen pembelajaran siswa tunanetra secara umum yang terdapat di MAN Maguwoharjo pada mata pelajaran kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya (Johandri, 2012).
3. Penelitian yang berjudul “*Model Pendidikan Inklusif di MAN Maguwoharjo*”. Penelitian yang disusun oleh Amir Ma’ruf, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengkaji model pendidikan inklusif yang ada di MAN Maguwoharjo (Amir Ma’ruf, 2012).
4. Jurnal Penelitian Pendidikan yang ditulis oleh Haryono, Ahmad Syaifudin dan Sri Widiastuti (Universitas Negeri Semarang) yang berjudul “*Evaluasi Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah*”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian tersebut ialah (1) manajemen kesiswaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih jauh panggang dari api. Hal ini disebabkan karena (i) proses penerimaan siswa baru yang berlatar belakang ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK, (ii) proses identifikasi dan

asesmen ABK tidak berjalan sesuai yang diharapkn, dan (iii) lembar identifikasi, asesmen dan deskripsi ABK tidak tersedia di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; (2) manajemen kurikulum pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai jauh dari harapan. Hal ini disebabkan (i) kurikulum dikembangkan dengan model modifikasi hanya pada tataran rancangan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan sistem evaluasi), (ii) program pembelajaran individu (PPI) tidak diberikan kepada ABK, dan (iii) laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak disusun; (3) manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan ketidapahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Untuk itu, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan tentang pendidikan inklusif; (4) manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang. Hal ini disebabkan penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak normal tidak dibedakan. Sarana dan prasarana khusus bagi siswa ABK masih diabaikan; (5) manajemen pembiayaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan bahwa sekolah inklusi di Jawa Tengah belum menyebutkan implementasi program pendidikan inklusif dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Biaya yang diperoleh dari dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota umumnya hanya digunakan untuk memberikan beasiswa bagi ABK maupun biaya tambahan bagi guru mata pelajaran yang merangkap menjadi guru pembimbing khusus bagi

ABK; dan (6) manajemen lingkungan dan layanan khusus pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Karena disebabkan oleh banyak di antara sekolah yang masih kurang melibatkan masyarakat dalam implementasi pendidikan inklusif secara penuh. Bahkan, ada masyarakat di sekitar sekolah inklusif tidak mengetahui jika sekolah di sekitarnya melaksanakan implementasi pendidikan inklusif. Kondisi serupa tampak pada manajemen layanan khusus bagi ABK yang dinilai kurang. Hal ini disebabkan oleh kucuran dana yang minim dan terbatas membuat layanan khusus dijalankan sekadarnya. Program pembelajaran individu, bakat dan minat para ABK tidak ditangani secara optimal dan bahkan terkesan hanya sekedar menerima ABK tanpa diberikan sejumlah perlakuan-perlakuan yang berbeda dengan siswa normal lainnya (Haryono *et al.*, 2015: 119-226).

5. PEDAGOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Riska Ahmad (Universitas Negeri Padang) yang berjudul “*Memaknai dan Mengembangkan Keberagaman Peserta Didik Melalui Pendidikan Inklusif*”. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah pendidikan inklusif digunakan untuk mengakomodasi semua anak atau siswa tanpa memperhatikan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak usia ekonomi rendah. Pendidikan inklusif adalah upaya menuju kepada pendidikan inklusif merupakan sesuatu hal yang perlu direalisasikan. Diakui bahwa saat ini di Indonesia upaya ini belum optimal. Sebagian

besar pendidik yang berada di sekolah reguler, kelihatannya juga belum mampu memahami dan mengembangkan potensi peserta didik sebagaimana mestinya, apalagi jika harus berhadapan dengan peserta didik yang lebih beragam dan bervariasi. Berbagai kondisi menggambarkan telah terjadi “kecelakaan pendidikan”, sebagai dampak pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidik tanpa berpijak pada kaidah ilmu pendidikan, seperti pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia dan tidak terkembangkannya potensi peserta didik secara optimal. Oleh sebab itu, agar pendidik dapat memaknai dan mengembangkan keberagaman peserta didik melalui pendidikan inklusif, diperlukan berbagai upaya. Upaya itu terkait dengan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) pendidik tentang ilmu pendidikan, tentang pendidikan inklusif dan strategi pembelajarannya. Kepada masyarakat perlu sosialisasi pendidikan. inklusif sehingga masyarakat memiliki kesamaan persepsi, bagi para pimpinan perlu perbaikan aspek manajerial serta komitmen demi terselenggaranya pendidikan tersebut. Disamping itu satuan pendidikan yang ada perlu berbenah untuk memikirkan sistem pendidikan, termasuk kurikulum, sistem asesmen, model pembelajaran yang disesuaikan dengan keberagaman peserta didik yang ada (Ahmad, 2010: 55-66).

6. Jurnal Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Ery Wati (Magister Pascasarjana Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) yang berjudul “*Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh*”. Jurnal ini menunjukkan sebuah

temuan bahwa Program Kepala Sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Program pendidikan inklusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, sehingga tidak ditemukan kembali anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah. Berkenaan tentang Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO Kota Banda Aceh. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan di dalam kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran dan guru pendamping khusus), dan juga untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai (Wati, 2014: 368-378).

7. Jurnal penelitian Maria J. Wantah dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan) yang berjudul *Evaluasi Program Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gejayan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah pelaksanaan program Pendidikan inklusif di SDN belum sesuai dengan yang ditargetkan nasional. Guru kelas, guru pembimbing khusus dan ABK serta penyelenggaraanya belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses pembelajaran yang terjadi di

SDN, secara umum sesuai dengan rencana berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berkaitan dengan produk, manfaat penyelenggaraan program inklusif sudah dapat dirasakan ABK, karena mereka boleh belajar Bersama-sama dengan anak normal di kelas reguler walaupun hasil belajar yang dicapai oleh ABK belum seperti anak-anak normal (Wantah, 2008: 58-69)

8. Jurnal *Dinamika Manajemen Pendidikan* yang berjudul *Manajemen Kurikulum Berbasis Entrepreneurship di SMA Muhammadiyah 9 (SMAM 9) Surabaya* yang ditulis oleh Muhammad Dandi Subiantoro dan Karwanto. Adapun kesimpulan yang tersaji ialah perencanaan kurikulum berbasis *entrepreneurship* dimulai dengan menentukan struktur kurikulum yang akan menjadi dasarnya, setelah terbentuk struktur mulai difikirkan konsep struktur tersebut terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang nantinya akan mengatur proses pembelajaran di SMAM 9 Surabaya. Pelaksanaan kurikulum berbasis *entrepreneurship* mempunyai pengaturan yang berjenjang pada setiap tingkatan kelas peserta didik sesuai dokumen kurikulum yang telah disusun, setiap proses pembelajaran di SMAM 9 Surabaya. Adapun evaluasi dilakukan dengan berpedoman pada sasaran mutu sekolah dan memperhatikan dimensi program dan pelaksanaan (Subiantoro dan Karwanto, 2016: 55-67)
9. Jurnal *Pendidikan Khusus* yang berjudul *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan keseriusan Manajemen Sekolah* yang ditulis oleh

Hermanto. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa model layanan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, salah satunya ialah model inklusif. Hal mendasar yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh sekolah penyelenggara ialah adanya keseriusan keterlibatan manajemen sekolah. Keterlibatan tersebut antara lain *pertama* penyamaan persepsi oleh warga sekolah yang dimotori oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan manajemen inklusis. *Kedua*, menyusun program sekolah atau program kelas. *Ketiga*, melaksanakan implementasi. *Kempat*, melakukan pendampingan, serta *kelima* melakukan sosialisasi ataupun publikasi tentang sekolah inklusi (Hermanto, 2010: 65-82).

10. Jurnal penelitian yang berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusif* yang ditulis oleh Sunardi dan Sunaryo. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa hakekat dari pendidikan inklusi adalah visi baru di bidang Pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik, HAM, otonomi, desentralisasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Pendidikan luar biasa, Pendidikan inklusif merupakan paradigm baru dalam Pendidikan bagi penyandang cacat yang diilhami dan didorong oleh berbagai dokumen internasional, khususnya tentang Pendidikan untuk semua dan Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengenai Pendidikan berkebutuhan khusus tahun 1994. Untuk itu, diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya (Sunardi dan Sunaryo, 2011: 184-200).



11. Jurnal Pendidikan Khusus yang ditulis oleh Fitria Dewi Puji Lestari berjudul *Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama*. Kesimpulan dari tulisan tersebut ialah manajemen peserta didik dimulai dengan perencanaan penerimaan peserta didik baru melalui kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2013 yang dimodifikasi ke dalam bentuk silabus dan RPP modifikasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Proses pembelajaran tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi kegiatan analisis SKL dan KD serta pembuatan RPP modifikasi (Lestari, 2017: 1-13)
  
12. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan yang berjudul *Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif (Studi Kasus di SD Negeri 4 Kreet Jambon Ponorogo)* oleh Ady Setiawan. Kesimpulan dari jurnal tersebut antara lain persiapan dalam pelaksanaan kurikulum modifikasi sekolah inklusif. Tiga hal yang disiapkan ialah tenaga pendidik melalui pelatihan, sarana pra sarana yang telah aksesibel, dan orang tua melalui kegiatan sosialisasi. Identifikasi dan asesmen PDBK. Pembuatan profil siswa PDBK. Perencanaan kurikulum modifikasi melalui tim khusus dan tim umum. Penggunaan kurikulum modifikasi dalam pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan kurikulum inklusi dilakukan secara internal setiap tiga bulan melibatkan seluruh elemen termasuk orang tua peserta didik (Setiawan, 2016: 54-67).

13. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis oleh Abdul Salim berjudul *Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik*. Penelitian ini mengembangk model modifikasi kurikulum anak berkebtuhan khusus dan mengetahui validitas empiris modifikasi kurikulum. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah *pertama* pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap panduan modifikasi kurikulum menunjukkan (a) sangat baik 46,93%, (b) baik 32,65%, (c) kurang baik 16,32% dan 4% tidak baik. *Kedua*, validitas empiris buku panduan menunjukkan bahawa (a) 88,2% guru dan kepala sekolah menyetujui kebrmaknaan/subtansi buku dan 11% kurang menyetujui (b) 88,2% menyatakan buku panduan telah menggunakan Bahasa yang baik dan 11% menyatakan belum (c) sebanyak 88,2% menyatakan buku panduan telah menggunakan gaya penulisan yang singkat, padat dan baik, sedangkan sebanyak 11,8% tidak menjawab pertanyaan (d) sekitar 64,7% menyatakan penampilan buku panduan telah meiliki penampilan baik dan 29,4% belum baik serta 11,8% tidak menjawab pertanyaan (Salim, 2010: 21-34).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi di SMPM 9 Yogyakarta. Penulis akan melakukan penelitian tentang implementasi manajemen kurikulum inklusi di SMPM 9 Yogyakarta. Hal inilah yang menjadi perbedaan penelitian dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Manajemen Pendidikan**

Menurut Bush dalam Bush dan Coleman menyatakan "Manajemen pendidikan adalah suatu studi dan praktek yang dikaitkan atau diarahkan dalam operasional organisasi pendidikan" (Bush *et al.*, 2000: 4). Organisasi pendidikan membutuhkan suatu bentuk pengaturan kegiatan. Pengaturan kegiatan tersebut mengarah pada suatu sistem yang sistematis. Pengaturan kegiatan yang sistematis itu akan dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang terwujud dalam suatu manajemen pendidikan.

Seperti yang diungkap oleh Arikunto Suharsimi, menyatakan "Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien" (Suharsimi, 2008: 4). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan awal, dalam suatu manajemen diperlukan adanya kerjasama, sekelompok orang, dan tujuan yang akan dicapai. Tentu dalam menjalani proses tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna.

Lebih lanjut, yang dikelola dalam manajemen adalah semua bentuk kegiatan yang dikelompokkan dalam komponen-komponen. Komponen-komponen manajemen pendidikan meliputi: (1) manajemen kesiswaan; (2)

manajemen personil; (3) manajemen kurikulum; (4) manajemen sarana; (5) manajemen pembiayaan; (6) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan terakhir; (7) manajemen hubungan masyarakat (Suharsimi, 2008: 4).

Seiring sejalan dengan hal di atas, Hikmat menuturkan, "Manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih clan atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (non material maupun material) secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan" (Hikmat, 2009: 21). Dari pernyataan tersebut selain kerjasama, sekelompok orang, dan tujuan ditambahkan sumber daya organisasi, baik personil maupun material. Beliau juga mengungkapkan manajemen pendidikan manajer kepala sekolah memiliki tugas untuk (1) mengelola seluruh program pendidikan; (2) mengelola aktivitas anak didik; (3) mengelola personil lembaga pendidikan; (4) mengelola pengadministrasian; (5) mengelola kebendaharaan lembaga pendidikan; (6) mengelola pelayanan bantuan tenaga kependidikan; (7) mengelola hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat (Hikmat, 2009: 21).

Suharno berpendapat, sedikitnya terdapat enam komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu: (1) kurikulum dan pengajaran; (2) tenaga kependidikan; (3) kesiswaan; (4) keuangan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat manajemen pelayanan khusus dan manajemen waktu (Suharno, 2008: 19).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia, baik studi dan praktek operasional penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen sekolah. Namun, demikian manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dan sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada salah satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan.

## **2. Manajemen Kurikulum**

Kurikulum berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*Curriculae*" artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah (Hamalik, 2005: 16).

Pengertiannya dalam dunia pendidikan: suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2012: 3).

Kurikulum adalah program pendidikan (sekolah) bagi siswa berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Hamalik, 2010: 10).

Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran disuatu sekolah atau madrasah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah, itulah kurikulum. Apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu: 1) sebagai rencana pengajaran, 2) sebagai rencana belajar murid, 3) sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah (Hidayat, 2013: 21).

Menurut Hilda Taba, sebagaimana dikutip oleh Munir, bahwa kurikulum sebagai rencana belajar (*a curriculum is a plan for learning*). Rencana belajar biasanya berisi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran dan evaluasi (Munir, 2008: 28). Menurut Ibrahim Bafadhal, bahwa kurikulum merupakan keseluruhan program pengalaman belajar yang dipersiapkan untuk peserta didik. Pada latar kanak – kanak, kurikulum

disebut dengan istilah Program Kegiatan Belajar (PKB) (Bafadhal, 2006: 67).

Makna kurikulum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : tradisional, modern dan masa kini. Secara tradisional : kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan disekolah atau bidang studi. Modern : semua pengalaman aktual yang dimiliki siswa dibawah pengaruh sekolah. Masa kini : strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah (Sulistiyono, 2009: 39).

Adapun Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012: 3). Pendapat lain menerangkan, manajemen kurikulum adalah pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar (dalam istilah sekarang adalah pembelajaran), agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil maksimal (Mustari, 2014: 57). Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititikberatkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar (Rusman, 2012: 3).

Menurut Rusman pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar ) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga

kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. (Rusman, 2012:4).

Rusman menyatakan (2012: 4), terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

- a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum
- b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. Efektifitas dan efisiensi, Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.



- e. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selanjutnya Rusman (2012:11) menjelaskan tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum, yaitu: (a) menyusun perencanaan sekolah; (b) mengembangkan organisasi sekolah; (c) memimpin sekolah; (d) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah; (e) menciptakan budaya dan iklim sekolah; (f) mengelola guru dan staf; (g) mengelola sarana dan prasarana sekolah; (h) mengelola hubungan sekolah dan masyarakat; (i) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru; (j) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran; (k) mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang ; (l) mengelola ketatausahaan; (m) mengelola unit layanan khusus; (n) mengelola sistem informasi sekolah; dan (o) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah.

Tugas dan peran kepala sekolah dalam mewujudkan subkompetensi manajemen kurikulum ini dapat direfleksikan oleh dirinya dari isi program kurikulum yang didesain atau dirancang dan dikembangkan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kurikulum itu sendiri, misalnya dalam bentuk evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi terhadap sekolah secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses – proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya.

### **3. Perencanaan Kurikulum**

Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa – peristiwa yang terjadi dibawah pengawasan sekolah.

Menurut Rusman (2012:17) pemerintah pusat perlu merumuskan dan menetapkan kurikulum standar bersifat nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut pihak daerah maupun sekolah bertugas mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah maupun sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan atau desain kurikulum baik berupa silabus maupun rencana

pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan secara spesifik, efektif, efisien, relevan, dan komprehensif.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. Hamalik (2006:151) menyebut aspek – aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum yaitu berdasar konsep yang jelas, dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkait minat anak, dan ada partisipasi kooperatif.

#### **4. Organisasi Kurikulum**

Kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan sebaiknya berisi tentang bahan belajar, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai karakteristik tersendiri, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup (Rusman, 2012:59).

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara aktif.

#### **5. Implementasi Kurikulum**

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru di uji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang baik.

Implementasi kurikulum merupakan bagian dari kegiatan inovasi, perubahan dan pengalaman belajar kepada siswa.

Zaenul (2013: 39) menyatakan implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas – aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Rusman (2010:75-76) menyatakan kemampuan – kemampuan yang harus dikuasai guru dalam mengimplementasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman esensi dari tujuan–tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum.
- b. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan–tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik.
- c. Kemampuan menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran.

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan

dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Zaenul (2013:41) implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna dilapangan, (2) strategi pengguna implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum dan kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum dilapangan dan (3) karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum harus mengacu pada standar proses pendidikan yang sudah dirancang oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berupa konsep, prinsip, isi, metode dan sistem evaluasi pembelajaran.

## **6. Evaluasi Kurikulum**

Sistem evaluasi Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan mengevaluasi atau mengoreksi hal – hal yang telah terjadi atau dilakukan

selama kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut: (a) Penilaian otentik; (b) Penilaian diri; (c) Penilaian berbasis portofolio; (d) Ulangan harian; (e) Ulangan tengah semester; (f) Ulangan akhir semester; (f)Ujian Tingkat Kompetensi; (g) Ujian Mutu Tingkat kompetensi; (h) Ujian Nasional; dan (i) Ujian Sekolah / Madrasah.

Rusman (2013:94) menyatakan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Di samping itu evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Rusman (2013:99) menyatakan tujuan evaluasi adalah penyempurnaan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi pembelajaran adalah suatu sistem atau cara penilaian yang

dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kecakapan siswa dalam menerima dan memahami pelajaran.

## **7. Pendidikan Inklusi**

Istilah inklusi berasal dari Bahasa Inggris "*inclusion*" yang berarti terbuka. Interpretasi yang dikemukakan terkait konsep pendidikan inklusi menunjukkan jumlah yang banyak, baik moderat maupun radikal. Sebagian orang mengartikan sebagai *main streaming*, namun sebagian yang lain mengartikan sebagai *full inclusion*, yang maknanya adalah menghapus semua sekolah khusus. Selain dari pada itu, inklusi merupakan suatu pendidikan bagi siswa yang mengalami hambatan, menjadi sebuah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial yang ada di sekolah (Smith 2012: 46).

Sekolah inklusi menyediakan pendidikan yang layak dan bermutu, menantang, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Sekolah inklusi merupakan tempat setiap siswa dapat diterima dan menjadi bagian dari sekolah tersebut (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 9).

## **8. Landasan Pendidikan Inklusi**

### **1. Landasan Filosofis**

Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, setiap anak mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Sistem pendidikan

seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum. Sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 8).

Selain dari pada itu, landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika (Ilahi, 2016: 72). Filosofi ini sebagai wujud pengakuan kebhinnekaan manusia, baik kebhinnekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi.

Sebagai Bangsa yang memiliki pandangan filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif harus juga diletakkan secara sinergis dan tidak boleh bertentangan dengan satu sama lain. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi yang luar biasa, yang bila dikembangkan dengan baik dan benar akan menghasilkan suatu proyeksi masa depan bangsa yang tidak terbatas.



Sebagai landasan filosofis, kebhinnekaan memiliki dua cara pandang, yaitu kebhinnekaan vertikal dan horizontal. Kebhinnekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan lain sebagainya. Sementara kebhinnekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, dan afiliasi politik (Ilahi, 2016: 74-75). Aspek vertikal dan horizontal dalam kebhinnekaan sesungguhnya merupakan bagian penting dalam landasan pendidikan inklusif yang merangkul semua kalangan untuk bersatu padu dalam bingkai keberagaman.

Bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kelainan (Kecacatan/Kebutuhan Khusus) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinnekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Pada individu berkebutuhan khusus pasti akan ditemukan kelebihan atau keunggulan tertentu. Sebaliknya, pada diri individu yang berbakat pasti terdapat juga kecacatan atau kekurangan tertentu karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna, ada kelebihan dan kekurangan. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, ataupun agama. Hal inilah yang diwujudkan dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang beragam sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa yang beragama dengan kelebihan maupun kekurangan masing-masing

siswa, sehingga dapat mendorong munculnya sikap saling saling asalah, silih asih, silih asuh dengan semangat toleransi.

## 2. Landasan Religius

Sebagai Bangsa yang menjunjung nilai-nilai agama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari konteks agama karena Pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Tuhan tidak sekaligus menjadikan manusia langsung beriman pada-Nya, tetapi masih melalui proses kependidikan yang berkeimanan dan Islami. Dalam hubungan dengan konsepsi Pendidikan Islam yang nativistis, factor pembawaan diakui pula sebagai unsur pembentuk corak keagamaan dalam diri manusia (Arifin, 2003, 145).

Beberapa ayat Al Quran yang menjadi landasan diantaranya ialah Al Quran Surat AL Hujuraat ayat 13 yang memerintahkan kita untuk saling berinteraksi kepada sesama manusia dari berbagai suku, bangsa, ras, ekonomi, bahkan agama. Ayat selanjutnya ialah Al Quran Surat Al Maidah ayat 2 yang berisi tentang perintah kepada kita agar kita memberikan pertolongan kepada siapa pun, terutama kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keluarga, keterbatasan fisik.

Dalam Al Quran, hakikat manusia adalah makhluk *individual differences* atau manusia berbeda dengan satu sama lain, sehingga harus saling berinteraksi dan berhubungan. Anak didik yang

membutuhkan layanan pendidikan inklusif pada hakikatnya ialah manifestasi dari manusia sebagai makhluk *individual differences* (Ilahi, 2016: 76-77)

### 3. Landasan Yuridis

Adapun landasan yuridis tentang pelaksanaan pendidikan inklusi tertuang dalam hal-hal berikut ini :

- a. Undang Undang Dasar 1945, ps 31 (1) dan (2).
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ps 51.
- c. Undang Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional: ps 3, ps 4 (1), ps 5 (1) (2) (3) (4) , ps 11 (1), ps. 12 (1.b).
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.380/G.06/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 8).

### 4. Landasan Pedagogis

Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi seorang siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui pendidikan seorang siswa di bangsa ini dapat dididik dan diajarkan untuk mengembangkan segala potensinya. Seorang siswa tidak dapat bersosialisasi dan menjadi warga negara yang baik jika siswa tersebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berada dalam masyarakat yang sangat plural. Para siswa difabel harus diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan cara memasukkan mereka ke dalam kelas-kelas reguler agar dapat dibentuk menjadi individu-individu yang menghargai adanya perbedaan (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 11)

#### 5. Landasan Empiris

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia, (1948), *Declaration of Human Rights*,
- b. Konvensi Hak Anak, (1989), *Convention on the Rights of the Child*,
- c. Konferensi Dunia (1990), tentang Pendidikan untuk Semua, (*World Conference on Education for All*),
- d. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*)
- e. Pernyataan Salamanca (1994), tentang Pendidikan Inklusif,
- f. Komitmen Dakar (2000) mengenai Pendidikan untuk Semua,
- g. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”

h. Rekomendasi Bukittinggi (2005), tentang meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang ramah bagi semua (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 9).

## **9. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan**

### **a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu.**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

### **b. Prinsip kebutuhan individual**

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

### **c. Prinsip Kebermaknaan**

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

### **d. Prinsip keberlanjutan**

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

e. Prinsip Keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 10).

## 10. Tujuan

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak
- b. Mempercepat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar
- c. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah
- d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua anak (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 10-11).

## 11. Sasaran

Sasaran pendidikan inklusif adalah semua anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri atas anak yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun

hambatan dalam perkembangan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif diantaranya, cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas dan atau berbakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil/terbelakang, suku terasing, korban bencana alam/sosial, kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), anak gelandangan dan nomaden, dll sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007: 11).